

KOMUNITAS TIONGHOA DALAM PUSARAN POLITIK: AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI MOJOKERTO, 1959-1980

Lukiyati Ningsih, Sarkawi B. Husain

Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya

Abstrak

Artikel ini membahas tentang aktivitas sosial dan ekonomi etnis Tionghoa di Mojokerto, dengan batasan tahun 1959-1980. Artikel ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa di Mojokerto dalam melakukan kegiatan ekonominya mendekati wilayah aliran Sungai Brantas yang melewati wilayah Mojokerto. Usaha-usaha yang dimiliki etnis Tionghoa tersebar di beberapa titik. Di wilayah kota etnis Tionghoa menguasai pusat kegiatan perdagangan yang terletak di Jalan Majapahit. Sementara itu, aktivitas pertanian tersebar di wilayah pedesaan di kabupaten. Penerapan PP No. 10 Tahun 1959 mengakibatkan Tionghoa yang tinggal di pedesaan harus pindah ke wilayah kota. Dalam lingkup Jawa Timur penerapan Peperada Jatim 1966 mengakibatkan perubahan terhadap atribut ke-Tionghoa-an dalam kegiatan perekonomian di wilayah Mojokerto.

Kata Kunci: Aktivitas Sosial Ekonomi, Mojokerto, Tionghoa.

Abstract

This article discusses the social and economic activities of ethnic Chinese in Mojokerto between 1959 and 1980 and it shows that ethnic Chinese in Mojokerto conducted their economic activities close to the riverbanks of the Brantas River in Mojokerto area. Businesses owned by ethnic Chinese scattered over areas of Mojokerto. Ethnic Chinese in urban areas dominated trading activities at the city center located at Majapahit street while other activities, mainly agricultural activities, were spread in rural areas of the district. The implementation of the regulation PP 10 1959 forced Chinese population living in the countryside to move into the city. In East Java, the implementation of the regulation Peperada Jatim 1966 resulted in the changes of the attributes of Chineseness in economic activities in the area of Mojokerto.

Keywords: Social Economic Activities, Mojokerto, Chinese

PENDAHULUAN

Indonesia telah lama menjadi perjumpaan silang kebudayaan dari berbagai bangsa, baik yang berasal dari Eropa, Asia Timur, maupun Timur Tengah. Salah satu bangsa yang telah lama memiliki kontak dengan Indonesia (baca: Nusantara) berasal dari Asia Timur, khususnya orang-orang Tionghoa. Dalam sejarah Indonesia, orang-orang Tionghoa telah datang ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa (Suryadinata 2002:100). Beberapa kajian tentang Tionghoa dengan berbagai aspeknya pun, khususnya di Jawa Timur sudah dilakukan oleh beberapa sarjana. Andjarwati Noordjanah (2010) misalnya menulis tentang komunitas Tionghoa di Surabaya. Kajian lain ditulis oleh Shinta Devi ISR (2014) dan Sarkawi B. Husain (2015). Jika Shinta Devi mengkaji tentang Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya, maka Husain memfokuskan kajiannya pada persoalan pemakaman bagi orang-orang Tionghoa pada tahun 1950an. Pada periode ini, orang-orang Tionghoa yang hendak menguburkan jenazah keluarganya berhadapan dengan masyarakat yang juga butuh ruang untuk hidup. Akibatnya, konflik pun tidak terhindarkan antara kedua kelompok masyarakat.

Berbeda dengan beberapa sarjana di atas, dalam artikel ini penulis memfokuskan kajian pada persoalan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa, khususnya di wilayah Mojokerto. Salah satu kerajaan yang menjadi tujuan berdagang etnis Tionghoa adalah Kerajaan Majapahit yang terletak di Trowulan Mojokerto. Menurut penelitian Adrian Perkasa, hubungan antara orang muslim Tionghoa dengan Majapahit telah berlangsung sejak awal berdirinya Kerajaan Majapahit (Perkasa, 2012:101). Hal tersebut membuktikan sudah lamanya etnis ini berhubungan dengan Nusantara.

Mojokerto yang menjadi lokus artikel ini adalah daerah yang dihuni oleh banyak etnis pribumi maupun orang asing, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Peranan etnis Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Mojokerto cukup dominan jika dibandingkan dengan etnis Arab dan pribumi. Aktivitas ekonomi tersebut turut mewarnai perjalanan sejarah ekonomi masyarakat Mojokerto. Hanya saja, kajian tentang kelompok masyarakat ini masih terbatas.

Komunitas Tionghoa yang ada di Mojokerto merupakan Tionghoa peranakan yang memiliki kecenderungan untuk tinggal di kota-kota. Pada tahun 1950-1958, mereka mendominasi sektor perdagangan. Hal ini kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1959, tentang pembatasan usaha pada etnis Tionghoa yang berstatus Warga Negara Asing. Pada tahun 1966 Pangdam Brawijaya VII Soemitro mengeluarkan Kebijakan Pepelrada Jatim yang melarang segala atribut ke-Tionghoa-an (adat dan bahasa) diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya toko-toko yang dahulunya menggunakan nama Tionghoa berubah menjadi nama-nama Indonesia. Dampak yang paling besar dari peraturan ini tentu terjadi pada kehidupan sosial etnis Tionghoa itu sendiri, tidak terkecuali di wilayah Mojokerto.

METODE

Bertitik tolak dari uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Mojokerto selama rentang waktu 1959-1980. Artikel ini menggunakan berbagai sumber yaitu arsip dan surat kabar. Selain sumber tertulis, juga dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

MOJOKERTO DAN AKTIVITAS SOSIAL ETNIS TIONGHOA

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Surabaya (ibu

kota Jawa Timur). Secara terminologi, Mojokerto berasal dari dua kata yakni “maja” dan “kerta”. Maja berarti buah *maja* yang banyak terdapat di wilayah Mojokerto dan *kerta* adalah negara. Keberadaan Mojokerto tidak bisa dilepaskan dari eksistensi dan kebesaran Kerajaan Majapahit. Menurut penelitian arkeologis, ibukota Majapahit berada di Desa Trowulan yang merupakan salah satu kecamatan di Mojokerto. Sebelum memperoleh namanya menjadi Mojokerto, wilayah ini bernama Japan.

Data tentang jumlah penduduk Tionghoa di Mojokerto tidak banyak tersedia. Namun demikian, dalam sebuah sumber disebutkan bahwa pada tahun 1930 jumlah penduduk Tionghoa di Mojokerto sebesar 23.600 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk Eropa berjumlah 3,8 %, Tionghoa sebanyak 11,1% dan penduduk Timur Asing lainnya berkisar 0,15%. Adapun sisanya merupakan penduduk pribumi (Nur Maulidani, 2016: 26). Persebaran etnis Tionghoa di Mojokerto meliputi wilayah kota dan kabupaten. Sementara wilayah lain yang menjadi persebaran etnis Tionghoa adalah wilayah yang dekat dengan Sungai Brantas.

Salah satu bukti banyaknya orang-orang Tionghoa yang bermukim di Mojokerto adalah terdapatnya Klenteng Tri Dharma “Hok Sian Kiong” yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 1 yang berdiri pada tahun 1823. Klenteng selalu ada dalam pemukiman orang-orang Tionghoa yang umumnya terletak di daerah aliran sungai atau dekat dengan pelabuhan dan menjadi elemen yang sangat penting dalam sebuah pemukiman masyarakat Tionghoa (Wibowo, 2000: 197). Pelarangan terhadap penggunaan bahasa Tionghoa di sekolah serta nama-nama Warga Negara Indonesia keturunan pada pasca proklamasi, juga berimbas pada aktivitas kegamaan di Klenteng. Sentimen terhadap kebudayaan Tionghoa berimbas pada pemurnian Klenteng sebagai tempat ibadah agama Budha. Akibatnya, ibadah di Klenteng dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, termasuk perayaan Imlek yang dirayakan dengan sekadarnya (Wawancara dengan Bambang Tjandrasa, 31 Maret 2018). Agama Khonghucu yang saat itu belum diakui oleh negara mengakibatkan beberapa orang memilih kepercayaan lain seperti Kristen dan Budha. Dalam catatan Charles A. Coppel, di Jawa Timur, pada tahun 1966 jumlah WNI keturunan Tionghoa yang memeluk agama Katolik sebesar 16,7% dan meningkat menjadi 26,7% pada tahun 1969 (Coppel, 1994: 211).

Tersedianya tempat ibadah berupa klenteng kemudian diikuti oleh fasilitas lain yakni berupa sekolah Tionghoa. Keberadaan Sekolah *Tiong Hwa Hwee Khan* (THHK) di Mojokerto tidak terlepas dari THHK Batavia (Nafi Hasan, 2014: 15). Pada tanggal 5 Agustus 1907 beberapa pemuka etnis Tionghoa mendirikan perkumpulan THHK. Pada tahun 1926 Pemerintah Kolonial membuka sekolah *Hollandsche Chineesche Schollen* (HCS) di Mojokerto. Perbedaan sekolah THHK dengan HCS adalah dalam segi pendanaan dan kurikulum. Selain kedua sekolah tersebut juga terdapat sekolah Tionghoa *Gie Hien* Mojokerto. Pendirian sekolah ini menggunakan sumbangan dari para donatur dari berbagai kota, utamanya Jakarta (wawancara dengan Mulyadi, tanggal 1 April 2018).

Pada tahun 1966 THHK ditutup seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah terhadap larangan sekolah Tionghoa. Penutupan sekolah THHK pada tahun 1966 mengakibatkan muridnya melebur dalam sekolah-sekolah milik pemerintah dan beberapa sekolah swasta yang berafiliasi dengan agama tertentu, misalnya sekolah Kristen dan Katolik. Sekolah di Mojokerto yang berafiliasi dengan agama Katolik adalah *Tunas Nusa Harapan* atau yang disingkat TNH. Sekolah TNH merupakan sekolah swasta yang menjadi tujuan bagi murid-murid sekolah yang terkena imbas pelarangan pemerintah dalam lingkup wilayah Mojokerto. Selain itu, ada yang pindah sekolah ke luar kota, misalnya Surabaya. Jika dipetakan jumlah murid yang melebur ke sekolah milik pemerintah dan

sekolah swasta yang berafiliasi dengan agama tertentu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan yang pindah ke sekolah di luar kota (wawancara dengan Soehadi Tanojo, tanggal 2 Juni 2018).

Dalam bidang kebudayaan dan kesenian, etnis Tionghoa Mojokerto melestarikan *Cing Bing* atau menziarahi makam leluhur yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan ritual ini dilakukan pada tanggal 4 April (menurut tahun kabisat) atau 5 April (jika tahun bukan kabisat) pada setiap tahunnya. Terdapat pula *wayang potehi* yang digelar dalam peringatan-peringatan tertentu di klenteng. Mojokerto tidak memiliki *wayang potehi* sehingga mendatangkan wayang dari luar kota seperti Semarang. Ketika kebijakan pelarangan terhadap atribut ke-Tionghoa-an diterapkan oleh pemerintah maka pagelaran *wayang potehi* tidak digelar. Kondisi ini bertahan hingga tiga puluh tahun. *Wayang potehi* di klenteng digelar kembali ketika Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menjabat sebagai presiden.

Penerapan Peperada Jawa Timur 1966 mengakibatkan orang Tionghoa mengganti nama mereka sesuai nama Indonesia. Pergantian nama di Mojokerto tercatat terjadi dari tahun 1962. Seorang warga negara keturunan yang berasal dari Rembang dan telah lama menetap di Mojokerto misalnya, yakni The Dingin Nio melakukan pergantian nama di Mojokerto. Pergantian nama juga dilakukan anak dari The Dingin Nio yakni The Bie Ing yang berubah menjadi Endah Herawati. Pada tahun 1970-an beberapa usaha yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa di Mojokerto juga mengalami perubahan nama, seperti Perusahaan Kue-kue yang mengajukan perubahan nama pemilik dari D.J Tjoeng Khoe Sin menjadi Soerjani. Selain pergantian nama, instruksi lain Peperada Jawa Timur ialah tentang pelarangan penggunaan huruf Tionghoa. Penerapan ini mengharuskan penghapusan terhadap huruf Tionghoa yang ada di papan-papan toko dan diganti dengan huruf latin (*Surabaya Post*, 10 Januari 1967).

Berbagai aktivitas sosial orang-orang Tionghoa dinaungi oleh beberapa organisasi yang mereka bentuk. Organisasi tersebut antara lain *Gie Hien Hua Hwee*, *Tiong Hwa Hwee Kwan*, *Tsing Nien Hue*, *Kwang Toeng Thung Siang Hwee*, *Sam Kauw Hwee*, *Poo Lam Kong Hwee*, *Shiau You Hui*, *Perwindo*. Pada periode 1970 di wilayah Mojokerto terdapat organisasi sosial yang bernama *Langgeng Sentosa* yang berfokus pada kegiatan amal dan bakti sosial yang diprakarsai oleh etnis Tionghoa Mojokerto dan bertahan hingga sekarang.

AKTIVITAS EKONOMI ETNIS TIONGHOA MOJOKERTO

Perdagangan dan pertanian adalah dua sektor yang telah lama digeluti oleh orang-orang Tionghoa di Mojokerto. Sektor perdagangan terpusat di wilayah perkotaan yakni di Jalan Majapahit, sementara pertanian tersebar di wilayah kabupaten. Bentuk aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di Mojokerto yang berpusat di Jalan Majapahit beraneka ragam. Toko-toko milik orang Tionghoa yang berjajar sepanjang jalan menjual berbagai macam kebutuhan, mulai dari meubel, kecap, pakaian, kain, studio foto, restoran, kebutuhan pokok hingga terdapat gedung bioskop. Selain etnis Tionghoa yang mendominasi perdagangan, terdapat orang Jawa, Arab serta India. Menurut sejarawan Onghokham, orang-orang Tionghoa menguasai jalan-jalan utama dari kota di Jawa, maupun bagian-bagian lain di Indonesia, misalnya di Yogyakarta, orang Tionghoa menguasai Jalan Malioboro, di Semarang menguasai Jalan Pemuda. Penguasaan jalan-jalan utama ini sekaligus menunjukkan dominasi mereka atas sektor ekonomi (Onghokham, 2008: 10). Fenomena yang disampaikan oleh Onghokham juga ditemui di Mojokerto dengan dikuasainya Jalan Majapahit sebagai sentral kegiatan ekonomi mereka.

Penguasaan ekonomi bagi orang-orang Tionghoa kemudian memunculkan banyak

orang kaya. Pada masa kolonial misalnya, terdapat kapitan Tionghoa yang paling kaya di wilayah Mojokerto. Kapitan ini bernama Tan Djoe An dan Lim Kok Ping yang memerintah di wilayah Mojosari. Tan Djoe An memiliki toko yang terletak di Jalan Majapahit. Namun demikian, pada masa revolusi kemerdekaan, toko Tan Djoe An dijarah dan dibakar oleh para pejuang. Pembakaran itu berlangsung pada malam hari. Peristiwa tersebut memicu protes konsul Tionghoa di Surabaya. Mereka menyayangkan seringnya terjadi teror pada orang-orang Tionghoa yang tidak bisa dicegah oleh Belanda. Konsul Tionghoa dan perkumpulan Chung Hua Tsung Hui, menilai Belanda tidak mampu menjamin keamanan orang Tionghoa di Mojokerto.

Pada tahun 1950-an toko-toko milik orang-orang Tionghoa sudah tidak sebesar sebelumnya. Kekuasaan berubah dan konsesi tidak lagi dimiliki. Toko Besar *Tan Djoe An* berganti pemilik kepada pribumi dan berubah nama menjadi Toko *Istune*. Toko ini dijual pada saat peristiwa 1965 (Wawancara Ayuhannafiq, tanggal 12 Mei 2018). Pada tahun 1969 dilakukan pelebaran Jalan Majapahit dan peremajaan toko-toko. Jalan Majapahit diperlebar dari yang semula 7-8 meter menjadi 12 meter atau total 16 meter dengan trotoarnya (Chabib Syarbini, 1973: 10). Peremajaan jalan juga meliputi pembuatan got baru di sebelah timur jalan. Pada tahun ini pula dilakukan penutupan rel kereta api yang mengangkut spiritus dari wates. Proyek pelebaran dan peremajaan ini berakhir pada tahun 1970.

Pada kurun waktu 1950-1955 terdapat empat jenis perusahaan kecap yang ada di wilayah Kota Mojokerto. Tiga usaha kecap tercatat memiliki izin, sementara satunya dinyatakan berhenti (Panitia Pantja Warsa DPRDS Kota Ketjil Modjokerto, 195: 188). Salah satu usaha membuat kecap terletak di Jalan Mojopahit No. 408. Perusahaan tersebut merupakan milik Yusak Kuintohardjo atau Tan Kee Sioe. Perusahaan lain ialah Roti/Kue. Terdapat beberapa usaha kue yang ada di Mojokerto. Salah satunya yang terletak di Jalan Majapahit No. 52 milik Ny. D.J. Tjoeng Kho Sin. Usaha ini berdiri pada 20 November tahun 1956. Usaha roti lain adalah Roti "Ong" yang terletak di Jalan Sidomulyo 9 No. 16. Jalan Sidomulyo merupakan wilayah yang terletak di belakang pusat pertokoan Jalan Majapahit (dekat dengan Pasar Kliwon). Usaha lain adalah Tukang Gigi yang berdiri pada tanggal 7 Januari 1959. Perusahaan ini terletak di Jalan Majapahit No. 65. Pada tahun 1970 tukang gigi berubah nama menjadi Toko Fajar dan telah berubah menjadi perusahaan pertokoan dan jasa.

Usaha lain yang dimiliki Tionghoa Mojokerto adalah industri rokok. Di wilayah Mojokerto industri rokok didirikan oleh Sarutomo pada tahun 1949. Perusahaan rokok ini bernama *Bokormas*. Pada mulanya *Bokormas* merupakan industri rumahan yang didirikan oleh lima bersaudara. Pabrik *Bokormas* terletak di Jalan Pahlawan Kota Mojokerto dan pendiriannya diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI Soedomo pada tahun 1985. Selain rokok, orang-orang Tionghoa Mojokerto juga bergelut dalam usaha jamu tradisional. Salah satunya adalah Jamu *Sido Jodo* yang beralamat di Jalan Sido Mulyo Gg.5/5A Kota Mojokerto. Usaha ini dimiliki Mak Kim Eng dan keluarga Kus Hariono yang didirikan pada tahun 1965 (<http://www.sidojodo.com/tentang-kami>).

Dalam sektor pertanian, etnis Tionghoa bergerak dalam bidang penggilingan padi, jasa pengangkutan, dan *mindring*. Pada tahun 1958 pemasukan padi ke pabrik sedikit lebih besar daripada pemasukan tahun 1957. Tercatat pada tahun 1957 di penggilingan padi terdapat 133 orang pekerja dan tahun 1958 mengalami kenaikan menjadi 139 orang (Mastuhu, 1959: 25). Total di lingkungan kabupaten terdapat 15 penggilingan padi. Terdapat lima pengolahan padi yang terletak di Kota Mojokerto, semuanya terletak di jalanan utama. Letak pengolahan padi berdampingan dengan beberapa toko-toko kecil.

Salah satu penggilingan padi yang terletak di wilayah kota ialah penggilingan padi di Penarib.

Sementara itu, terdapat spesialisasi untuk pedagang Tionghoa di Ngoro yakni padi, arang, dan gigi palsu. Mereka mempunyai truk yang berfungsi mengangkut hasil panen desa. Kepemilikan kendaraan pengangkut ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa, dalam hal ini Tionghoa di wilayah pedesaan setingkat di atas masyarakat biasa. Selain itu, orang Tionghoa juga bekerja sebagai *mindring*. Praktek *mindring* dilakukan dalam lingkungan pedesaan. Orang Tionghoa meminjam uang kepada petani untuk memanen padi, mereka mengambil keuntungan lebih dari 100 persen pada waktu panen. Orang Tionghoa yang melakukan *mindring* biasa dipanggil *encik mindring*. Pada awal tahun 1970 ke 1980 *mindring* mulai hilang keberadaannya dan digantikan dengan Bank Pasar. Keberadaan Bank Pasar dinilai tidak memberatkan karena bunga pinjaman lebih kecil.

PP NO. 10 TAHUN 1959, KEBIJAKAN PEPELRADA JATIM & AKTIVITAS EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI MOJOKERTO

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memproteksi pengusaha pribumi adalah PP No. 10 Tahun 1959. Peraturan ini mengatur tentang larangan bagi usaha kecil dan eceran asing untuk berjualan di luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan. Penerapan peraturan ini di wilayah Mojokerto berjalan normatif sebagaimana yang ditetapkan. Pada tahun 1959 misalnya, Mulyadi tidak bisa berjualan di Pasar Kedung Maling yang terletak di wilayah kecamatan. Meskipun terkena imbas larangan tersebut namun dalam kehidupan sosial masyarakat di desa yang ditempati berjalan seperti biasanya. Ia dan keluarga pun tidak pindah ke wilayah kota. Meski demikian dampak eksodus ke Tiongkok tidak dapat dihindarkan. Sehubungan dengan penerapan peraturan ini, salah satu anggota keluarga Mulyadi eksodus ke Tiongkok (wawancara dengan Mulyadi, tanggal 1 April 2018). Di pusat pertokoan Jalan Majapahit Kota Mojokerto, beberapa narasumber yang berprofesi sebagai pedagang di Jalan Majapahit mengutarakan bahwa meskipun peraturan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk diterapkan di Tingkat II namun tidak ada peristiwa besar yang terjadi di Mojokerto. Jalan Majapahit sebagai pusat perdagangan tidak mengalami penambahan pedagang akibat larangan berjualan di desa-desa.

Selama awal tahun 1960-an, perekonomian negara memburuk dan orang Tionghoa menjadi pion dalam politik Perang Dingin. Kerusuhan serius terjadi di daerah perkotaan yang ditujukan pada orang Tionghoa terjadi selama periode ketidakpastian pada tahun 1965/1966 (Onghokham, 2008: 23). Kerusuhan ini dikaitkan dengan orang Tionghoa sebagai antek komunis. Dalam bidang perekonomian tuduhan ini memiliki dampak berupa penjarahan toko yang dimiliki orang Tionghoa. Salah satu toko yang dijarah akibat peristiwa 1965 adalah firma milik Tan Djoe An.

Sementara itu, Pelelrada Jatim juga berimbas pada tidak beraktivitasnya toko-toko yang dimiliki etnis Tionghoa di beberapa kota. Toko yang diberi kesempatan untuk menampung barang-barangnya dan tidak dapat menampung arus pembeli telah diambil oleh Pancatunggal setempat dengan menutup sementara toko-toko milik Tionghoa. Selain itu, peraturan tentang larangan penggunaan huruf Tionghoa dalam perekonomian dan perdagangan mengakibatkan beberapa toko di Jalan Majapahit berubah nama menjadi nama Indonesia. Salah satu toko yang berubah nama adalah Toko *Inho* yang berubah menjadi toko *Sahabat* (wawancara The Bie Ing, tanggal 26 April 2018). Hingga tahun 1980 deretan toko yang ada di Jalan Majapahit telah berganti nama menjadi nama-nama Indonesia. Beberapa toko dan perusahaan yang tercatat dalam buku Mojokerto dalam

Sorotan Pers masa pemerintahan Walikota Samioedien antara lain; Toko *Tunggal* (konveksi), *Warna-Warni* (kain), *Luhur* (bangunan), Toko *Pembangunan*, Toko *Podo Seneng* (meubel), Toko *Tanjung* (konveksi), CV. *Sambas*, *Nancy Salon*, CV. *Karya Abadi*. Nama-nama Tionghoa dipastikan sudah tidak ada lagi di sepanjang jalan tersebut.

Pada tahun 1980 kawasan pertokoan pusat kota terus berbenah. Dalam menyempurnakan *outline* dan *master plan* kota dilakukan penanaman tanaman hias di sepanjang kompleks pertokoan Majapahit. Pembinaan juga dilakukan dengan mengganti lampu *mercury* yang terdapat di sepanjang jalan (*Jawa Pos*, 18 September 1980). Berbagai perbaikan yang dilakukan dalam membenah kawasan pertokoan pusat kota disambut baik oleh para pemilik toko dan pelaku ekonomi sekitar. Pemilik toko di sepanjang jalan mendukung program Pemerintah Daerah Kodya Mojokerto di bidang kebersihan dan keindahan (*Jawa Pos*, 30 Juni 1979). Toko-toko di sepanjang pusat ekonomi kota merupakan saksi bisu bagi kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan, utamanya tahun 1950-an di mana kondisi negara yang belum kondusif hingga tahun 1980 ketika perdagangan didengungkan sebagai slogan pembangunan kota. Etnis Tionghoa sebagai pelaku utama dalam sektor perdagangan “dipaksa” tunduk terhadap segala kebijakan yang diterapkan penguasa, sekalipun bersifat diskriminatif.

Pengaruh PP No. 10 Tahun 1959 dan Kebijakan Peperada Jatim berbeda-beda di setiap wilayah. Mojokerto sebagai wilayah kecil tentu berbeda dengan Surabaya. Meskipun kedua wilayah tersebut letaknya berdekatan namun pengaruh kebijakan yang terjadi di wilayah Mojokerto tidaklah sebesar di Surabaya. Mojokerto yang berdekatan dengan Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur tidak mengalami pergolakan sehubungan dengan sentimen anti Tionghoa. Pergolakan yang ‘akan terjadi’ mampu diredam oleh penguasa setempat. Artinya bahwa kontrol yang dimiliki pemerintah lokal dalam hal ini pejabat daerah memiliki peran dalam mengontrol keadaan. Wilayah Mojokerto yang rawan tersulut oleh situasi sedang terjadi di Surabaya ternyata aman-aman saja dan kondusif.

Sebelum tahun 1965 keadaan masih aman dan terkendali. Ketika terjadi huru-hara peristiwa 1965, orang-orang Tionghoa berusaha menghindari lokasi yang dijarah oleh orang non-Tionghoa. Menurut penuturan Soehadi, meskipun kondisi negara belum kondusif tetapi dia tidak mengalami permasalahan yang berarti. Menurutnya pada waktu itu hanya segelintir orang yang melakukan pergolakan di beberapa tempat. Pasca 1965 kebijakan Peperada yakni pada tahun 1966 tidak berdampak pada usaha kayu yang dimiliki Soehadi. Penerapan kebijakan dalam lingkup Jawa Timur ini dalam pelaksanaannya di dalam wilayah Jawa Timur berbeda, termasuk di dalamnya wilayah Mojokerto. Peraturan yang dikeluarkan dalam lingkup pusat memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya di daerah. Hal ini dikarenakan bahwa pengawasan masing-masing daerah terbatas dan tidak bisa menyeluruh.

REAKSI ETNIS TIONGHOA MOJOKERTO TERHADAP PP NO. 10 TAHUN 1959 DAN KEBIJAKAN PEPELRADA JATIM

Reaksi terhadap PP No. 10 dan Kebijakan Peperada di Jawa Timur terbagi menjadi dua. Pertama, golongan yang memiliki usaha dan kedua golongan yang tidak memiliki usaha atau masyarakat sipil biasa. Umumnya para pedagang Tionghoa asing mengambil berbagai langkah untuk menghindari pengaruh peraturan-peraturan itu. Beberapa mengalihkan usaha dagang mereka kepada sanak keluarga mereka yang menjadi warga negara Indonesia. Pedagang Tionghoa juga melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dalam upaya untuk mempertahankan usahanya. Mengenai perjanjian dengan kelompok perwira Angkatan Darat tertentu terjadi dalam lingkup pedesaan. Menurut seorang

narasumber, dia sempat didatangi oleh kelompok Angkatan Darat. Kelompok perwira ini cenderung melakukan perlindungan agar orang Tionghoa tidak pindah ke kota saat Peraturan Pemerintah tersebut diterapkan. Akan tetapi, narasumber tidak memberikan pernyataan bahwa antara dia dan kelompok perwira melakukan kesepakatan untuk dilindungi dengan membayar uang tertentu. Menurut penuturan Soehadi, pergolakan-pergolakan tersebut memang terjadi di beberapa tempat. Mojokerto dan Jombang jika dibandingkan dengan Kota Kediri dan Malang jauh lebih kondusif (wawancara dengan Soehadi Tanojo, tanggal 25 April 2018).

KESIMPULAN

PP No. 10 Tahun 1959 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian etnis Tionghoa di Mojokerto. PP tersebut yang melarang orang Tionghoa berjualan di desa-desa nyatanya tidak berjalan sesuai aturan dalam PP itu. Peraturan ini memang berdampak terhadap larangan berdagang di desa-desa, namun tidak menyebabkan perpindahan orang Tionghoa dari desa ke kota. Meskipun dampak eksodus ke Tiongkok tidak dapat dihindarkan. Kebijakan Peperada Jatim tidak menimbulkan pergolakan yang berarti di Mojokerto, meskipun secara geografis Mojokerto berdekatan dengan Surabaya. Ketika di Surabaya terjadi peristiwa 21 Oktober 1968, ketika sekelompok pemuda dan rakyat melakukan tindakan pengrusakan terhadap benda-benda dan mobil milik orang Tionghoa, pemuda di Mojokerto memang tersulut dan akan melakukan aksi serupa di Mojokerto. Setelah melalui berbagai pertimbangan utamanya para pemimpin pada masa itu yakni kepemimpinan Chabib Syarbini para pemuda tidak jadi melaksanakan aksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Coppel, Charles A. 1996. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasan, Nafi. 2014. "Dinamika Perkembangan Nasionalisme Sekolah THHK Mojokerto: Pengaruh Sekolah THHK Terhadap Nasionalisme Etnis Tionghoa Mojokerto 1946-1966". Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- Husain, Sarkawi B. 2015. "Chinese Cemeteries as a Symbol of Sacred Space Control, Conflict, and Negotiation in Surabaya", dalam Colombijn, Freek dan Joost Coté. *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. Leiden: Brill.
- Mastuhu. 1959. "Daerah Kabupaten Modjokerto Setjara Bentuk Globalnja". Penelitian Lapangan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosial Fakultas Pedagogik, Universitas Gajah Mada.
- Noordjanah, Andjarwati. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak.
- Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Panitia Pantja Warsa DPRDS Kota Mojdjokerto. 1955. *DPRDS Kota Ketjil Modjokerto Tahun 1950-1955*. Mojokerto: DPRDS Kota Ketjil Modjokerto.
- Perkasa, Adrian. 2012. *Orang-orang Tionghoa dan Islam Majapahit*. Yogyakarta: Ombak.

- Rahayu, Shinta Devi Ika Santhi. 2014. *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Syarbini, Chabib. 1973. *Lima Tahun Menjadi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto*. Mojokerto: Pemerintah Kotamadya Mojokerto.
- Wibowo, T. 2000. *Harga yang Harus Dibayar*. Jakarta: Gramedia.
- Yulianingsih, Wiwik. 2012. "Sejarah Kota Mojokerto Tahun 1912-1942". Skripsi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Malang.
- Zaujainis Al, Nur Maulidani. 2016. "Buruh Pabrik Gula Gempolkerep Tahun 1920-1965". Skripsi Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga.

Surat Kabar

Djava Post, 27 Februari 1960.

Jawa Pos, 30 Juni 1979; 18 September 1980.

Surabaja Post, 10 Januari 1967.

Internet

<http://www.sidojodo.com/tentang-kami> diakses tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 15.00 WIB.

Wawancara

Nama : Ayuhanafiq (40 tahun)

Status : Mantan Ketua KPU Kab. Mojokerto dan Pemerhati Sejarah

Alamat : Sidowamangun RT.10 RW 5, Ds. Kudungsari, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto.

Nama : Bambang Tjandrasa (73 tahun)

Status : Pemilik Tailor Anda

Alamat : Jl. PB Sudirman Kota Mojokerto.

Nama : Mulyadi (69 tahun)

Status : Pemilik Toko Sampurna

Alamat : Jl. Ahmad Yani Kota Mojokerto.

Nama : Soehadi Tanojo (80 tahun)

Status : Alumnus dan Guru THHK Mojokerto

Alamat : Jl. Gambiran Mojoagung Jombang.

Nama : The Bie Ing (Endah Herawati) (73 tahun)

Status : Pengurus Klenteng Hok Sian bagian Khonghucu

Alamat : Jl. Gedongan VI No.1 Kota Mojokerto.